

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia merupakan salah satu isu penting dalam hubungan bilateral kedua negara yang telah berlangsung selama beberapa dekade. TKI memiliki peran yang sangat signifikan bagi kedua negara, baik dari perspektif ekonomi Indonesia maupun Malaysia. Dari sisi Indonesia, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Sementara itu, bagi Malaysia, tenaga kerja Indonesia menjadi tulang punggung di berbagai sektor, terutama di sektor-sektor seperti perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga. Namun, di balik kontribusi tersebut, muncul berbagai tantangan terkait perlindungan dan kesejahteraan TKI di Malaysia, yang menjadi perhatian bersama bagi kedua negara.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara, dengan Malaysia sebagai salah satu tujuan utama. Berdasarkan data resmi, terdapat jutaan TKI yang bekerja di Malaysia, baik secara legal maupun ilegal. Keberadaan TKI ini sangat berkontribusi terhadap perekonomian Malaysia, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja murah dan banyak. Di sektor perkebunan, misalnya, para pekerja Indonesia mendominasi tenaga kerja di ladang-ladang sawit, yang menjadi sumber devisa utama bagi Malaysia. Selain itu, di sektor konstruksi, TKI memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur negara tersebut. Tidak hanya di sektor-sektor yang padat karya, TKI juga banyak bekerja di sektor domestik, seperti pembantu rumah tangga, yang menyediakan layanan penting bagi keluarga-keluarga di Malaysia.

Bagi Indonesia, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, termasuk Malaysia, memberikan dampak ekonomi yang besar. Setiap tahun, TKI mengirimkan remitan dalam jumlah besar ke Indonesia, yang menjadi salah satu sumber devisa negara. Uang yang dikirimkan oleh TKI ini juga mendukung ekonomi keluarga di daerah-

daerah asal mereka, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap TKI tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga ekonomi makro Indonesia.

Meskipun TKI memberikan kontribusi besar bagi ekonomi kedua negara, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang serius selama bekerja di Malaysia. Salah satu masalah utama yang dihadapi TKI adalah eksploitasi tenaga kerja. Banyak TKI yang dipekerjakan di sektor-sektor dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti jam kerja yang panjang tanpa upah lembur, tempat tinggal yang tidak layak, dan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Selain itu, dalam beberapa kasus, TKI juga menghadapi kekerasan fisik dan mental, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor domestik. Pembantu rumah tangga, misalnya, sering kali mengalami kekerasan dari majikan mereka, yang meliputi pemukulan, pengurangan, dan bahkan kekerasan seksual.

Selain masalah eksploitasi, TKI di Malaysia juga sering menghadapi perlakuan diskriminatif. Meskipun mereka bekerja keras untuk menopang perekonomian negara, status mereka sebagai pekerja migran sering kali membuat mereka menjadi sasaran diskriminasi, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Dalam banyak kasus, TKI yang terlibat dalam sengketa hukum dengan majikan mereka kesulitan mendapatkan keadilan karena kurangnya dukungan hukum dan kendala bahasa. Hal ini diperparah dengan adanya perbedaan budaya dan agama antara pekerja Indonesia yang mayoritas Muslim dengan majikan mereka yang berasal dari berbagai latar belakang etnis di Malaysia.

Selain itu, TKI ilegal yang bekerja tanpa dokumen resmi juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak. Mereka sering kali dieksploitasi oleh agen perekrutan yang tidak bertanggung jawab, dipekerjakan dengan upah rendah, dan sulit mendapatkan perlindungan hukum karena status ilegal mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, TKI ilegal ini menjadi korban perdagangan manusia.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi TKI di Malaysia, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama bilateral yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran.

Salah satu instrumen penting dalam kerjasama ini adalah Memorandum of Understanding (MoU) yang diperbarui secara berkala. MoU tersebut mencakup berbagai aspek perlindungan, mulai dari penyusunan kontrak kerja yang adil, pengaturan jam kerja, hak atas upah yang layak, hingga jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang menghadapi masalah selama bekerja di Malaysia.

Pada tahun-tahun terakhir, MoU yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia telah mengalami beberapa pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI, khususnya mereka yang bekerja di sektor domestik. Dalam MoU tersebut, diatur pula tentang kewajiban majikan untuk memberikan hari libur, asuransi kesehatan, serta memastikan bahwa TKI mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.

Meskipun adanya berbagai perjanjian bilateral ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk melindungi TKI, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja. Banyak agen yang terlibat dalam praktek-praktek perekrutan yang tidak transparan dan mengeksploitasi pekerja dengan memungut biaya yang tinggi untuk proses perekrutan. Dalam beberapa kasus, TKI yang bekerja di Malaysia terjebak dalam hutang karena biaya perekrutan yang sangat besar, yang menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi.

Implementasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan TKI di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah kedua negara dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun ada perjanjian yang mengatur hak-hak TKI, sering kali perjanjian tersebut tidak diimplementasikan dengan baik di lapangan. Salah satu contohnya adalah kasus TKI yang bekerja di sektor domestik, yang sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan TKI sendiri tentang hak-hak mereka juga menjadi hambatan dalam upaya perlindungan. Banyak TKI yang tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja, terutama dalam hal

upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang layak. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh majikan yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi mereka.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan regulasi antara Indonesia dan Malaysia terkait tenaga kerja migran. Meskipun kedua negara telah menjalin perjanjian bilateral, perbedaan dalam sistem hukum dan regulasi masing-masing negara sering kali menghambat proses perlindungan TKI. Misalnya, dalam hal penegakan hukum, proses hukum yang lambat dan birokrasi yang rumit sering kali membuat TKI kesulitan untuk mendapatkan keadilan jika mereka menghadapi masalah dengan majikan mereka.

Selain kerjasama pemerintah, peran lembaga non-pemerintah (LSM) dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam melindungi hak-hak TKI di Malaysia. LSM-LSM ini berperan dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan, serta advokasi bagi TKI yang menghadapi masalah selama bekerja di Malaysia. Mereka juga sering kali menjadi penghubung antara TKI dan pemerintah Indonesia dalam hal pelaporan pelanggaran hak-hak tenaga kerja.

Beberapa LSM bahkan menyediakan tempat penampungan sementara bagi TKI yang melarikan diri dari majikan mereka karena mengalami kekerasan atau eksploitasi. Selain itu, LSM juga aktif dalam memberikan pendidikan kepada TKI tentang hak-hak mereka, baik sebelum berangkat ke luar negeri maupun selama bekerja di Malaysia. Melalui program-program ini, diharapkan TKI menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan mampu melindungi diri dari eksploitasi.

Secara keseluruhan, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi TKI telah memberikan beberapa hasil positif, terutama dalam hal perbaikan regulasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja migran. Perjanjian-perjanjian bilateral yang telah ditandatangani, termasuk MoU, menunjukkan adanya komitmen dari kedua negara untuk terus meningkatkan perlindungan bagi TKI.

Namun, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi agar perlindungan TKI dapat berjalan lebih efektif. Pengawasan yang lebih ketat terhadap agen perekrutan, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap majikan yang melanggar

hak-hak TKI, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, peran masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah juga perlu terus didukung untuk memperkuat perlindungan bagi TKI di Malaysia.

Dalam jangka panjang, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia harus terus diperkuat, tidak hanya melalui perjanjian di tingkat pemerintah, tetapi juga melalui upaya-upaya konkret di lapangan yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan TKI dapat bekerja dengan aman, mendapatkan hak-hak yang layak, dan berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan ekonomi kedua negara.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka adapun beberapa saran dari penulis untuk pihak-pihak maupun lembaga-lembaga terkait, yaitu ::

- Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Agen Perekrutan

Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus meningkatkan pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja. Sertifikasi dan akreditasi agen perekrutan perlu dipantau secara berkala agar agen yang tidak memenuhi standar segera ditindak. Agen yang terlibat dalam praktik-praktik yang eksploitatif, seperti pungutan biaya perekrutan yang tidak wajar, harus dikenakan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin operasional. Sistem pemantauan ini dapat diperkuat dengan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh calon TKI.

- Peningkatan Kesadaran dan Edukasi bagi TKI

Banyak TKI yang kurang memahami hak-hak mereka, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi sebelum keberangkatan bagi calon TKI, dengan fokus pada hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri. Ini dapat mencakup penyediaan materi pelatihan tentang hukum tenaga kerja di Malaysia, prosedur pelaporan pelanggaran, serta kewajiban majikan terhadap pekerja.

- Perbaiki Sistem Pengaduan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah kedua negara harus memperbaiki dan mempermudah sistem pengaduan untuk TKI yang mengalami pelanggaran hak. Layanan pengaduan yang cepat, efektif, dan mudah diakses harus diperkuat melalui hotline darurat, platform digital, dan kantor perwakilan di Malaysia. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa TKI yang terlibat dalam sengketa hukum mendapat pendampingan hukum yang memadai dan proses peradilan yang adil.

- Kerjasama dengan Lembaga Non-Pemerintah (LSM)

Lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam melindungi TKI. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu lebih proaktif dalam bermitra dengan LSM untuk memperkuat perlindungan bagi TKI, baik melalui penyediaan tempat penampungan sementara, layanan pendampingan hukum, maupun advokasi kebijakan. Koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan LSM dapat mempercepat penanganan kasus-kasus pelanggaran.

- Penegakan Hukum yang Lebih Tegas terhadap Majikan yang Melanggar

Pemerintah Malaysia harus memastikan bahwa setiap majikan yang melanggar hak-hak TKI dikenakan sanksi yang sesuai. Penegakan hukum yang tegas, termasuk pengenaan denda atau hukuman pidana bagi majikan yang melakukan kekerasan, penahanan upah, atau bentuk pelanggaran lainnya, perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

- Pembaruan dan Implementasi MoU yang Lebih Efektif

MoU yang diperbarui secara berkala antara Indonesia dan Malaysia perlu mencakup ketentuan yang lebih jelas dan dapat ditegakkan secara efektif. MoU tersebut harus mencakup peraturan yang lebih ketat terkait jam kerja, jaminan kesehatan, dan standar upah minimum. Implementasi MoU juga harus diawasi dengan baik melalui monitoring berkala oleh otoritas kedua negara.

- Peningkatan Fasilitas Ketenagakerjaan di Perwakilan Indonesia di Malaysia

KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan Konsulat Jenderal Indonesia di Malaysia perlu lebih memperkuat layanan konsuler yang khusus

menangani permasalahan TKI. Ketersediaan staf khusus yang dapat menangani keluhan TKI, serta penambahan layanan bantuan hukum dan psikologis di perwakilan Indonesia, sangat penting untuk membantu TKI yang mengalami masalah.

- Peningkatan Program Reintegrasi TKI

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat program reintegrasi bagi TKI yang kembali ke tanah air. Program ini harus mencakup pelatihan keterampilan untuk membantu mereka beradaptasi dengan pasar kerja lokal dan memulai usaha mandiri. Selain itu, dukungan psikologis bagi TKI yang mengalami trauma akibat kekerasan atau eksploitasi juga sangat penting untuk memfasilitasi reintegrasi yang sukses.

- Perluasan Penggunaan Teknologi untuk Perlindungan TKI

Penerapan teknologi dapat menjadi solusi untuk memantau kondisi kerja TKI secara real-time. Misalnya, aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk TKI dapat memungkinkan mereka melaporkan pelanggaran hak atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Selain itu, sistem kontrak elektronik yang transparan antara majikan, pekerja, dan pemerintah dapat mengurangi kemungkinan manipulasi kontrak kerja.

- Peningkatan Kerjasama Regional di ASEAN

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dapat diperkuat melalui mekanisme ASEAN. Melalui ASEAN, negara-negara anggota dapat menyusun pedoman regional untuk perlindungan tenaga kerja migran, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hak tenaga kerja migran. Pendekatan regional ini dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan lintas negara yang terkait dengan perlindungan pekerja migran.